

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK**



SKRIPSI

**Oleh : Inderi Lara Safitri
NPM 2163201059**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK**



SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik (SI) dan mencapai
gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)**

Oleh : Inderi lara Safitri

NPM 2163201059

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

PERSEMBAHAN

Segala Bismillahirrahmanirrahim. Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Segala Syukur atas karunia-mu menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disetiap proses perjalanan. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya sayangi :

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta penulis yakni Ayahanda Sumardi dan Ibunda Sri Mulyani terimakasih atas setiap tetes kringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar sarjana.
2. Kepada cinta kasih kakak kandung saya, Andre Ariski S.P. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Titi Darmi, M.Si selaku dosen pembimbing, terimakasih telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi salah satu anak bimbingan ibu merupakan nikmat yang sampai saat ini penulis syukuri.
4. Sahabat-sahabat saya tercinta dan tersayang yaitu Fentri Novita, Rosa Oktapia, Natasa Lia Utama, Klara Anjelika, Yuni Yulita, Wisnu Wijaya, dan Ardi Kurniawan yang telah membantu, mendukung, menghibur dalam kesedihan, mendengarkan segala keluh kesah yang dirasa dan tak lupa memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga waktu penulisan tugas akhir.
5. Terakhir kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah di ambil adalah bagian dari perjalanan, terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan nya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Inderi Lara Safitri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

MOTO

”Nyatanya, jika kita ingin benar-benar berkembang, kita harus siap menghadapi berbagai proses yang tidak nyaman. Proses itu seringkali melelahkan, menyakitkan, dan membuat kita ingin menyerah. Namun, seperti benih yang ingin tumbuh dan mempunyai batang yang kokoh ia juga harus siap melalui hujan deras, panas dan terik. Tetaplah menjadi manusia yang menyala walaupun cahayanya kecil sekalipun, tetaplah berlayar tangguh walaupun ombaknya besar sekali. Sebab manusia kuat bukanlah dia yang tak pernah patah, melainkan dia yang tetap bertahan meskipun rasanya ingin menyerah”

(Tinta Putih)

“Kamu ga akan menang ataupun kalah dari siapapun. Semua ada pada lintasannya masing-masing berjalanlah dengan yang lebih tenang”

(Angkasa)

“Karena ketergantungan pada manusia lain, hanya akan membuat seseorang terus kalah, kalah dan kalah”

(Unknown Agz)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inderi Lara Safitri

Npm : 2163201059

Prodi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bengkulu, Juni 2025

Yang Menyatakan



Inderi Lara Safitri

Npm. 2163201059

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

Oleh : Inderi Lara Safitri

NPM 2163201059

Dosen Pembimbing

Dr. Titi Darmi, M.Si

NP. 19680918 201008 2 096

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juli 2025

Jam : 11.00 – 12.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang FISIP

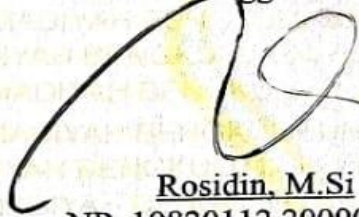
Tim Penguji

Ketua



Dr. Sri Indarti, M.Si
NP. 19710119 201508 2 114

Anggota 1



Rosidin, M.Si
NP. 19820112 200904 1 080

Anggota 2



Dr. Titi Darmi, M.Si
NP. 19680918 201008 2 096

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Juliana Kurniawati, M.Si
NP. 19780704 201008 2 095

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Oleh:
Inderi Lara Safitri
2163201059

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah Kabupaten Mukomuko. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terganggunya ketertiban umum, membahayakan keselamatan masyarakat, serta merusak kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur kepemilikan, pemeliharaan, dan pergerakan hewan ternak agar tidak menimbulkan gangguan sosial. Namun, setelah lebih dari satu dekade diberlakukan, implementasinya dinilai belum optimal dan belum mampu menekan jumlah pelanggaran secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi studi di Kabupaten Mukomuko. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat Satpol PP, perangkat desa, pemilik ternak, serta masyarakat non-pemilik ternak. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan maksimal. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan, terbatasnya sumber daya pelaksana, minimnya sosialisasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, pelaksana menunjukkan disposisi yang rendah dan cenderung bersikap reaktif. Kegiatan penertiban tidak terjadwal dan kurang melibatkan perangkat desa secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Peraturan Daerah, penertiban ternak, Satpol PP, Van Meter dan Van Horn.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF MUKOMUKO REGENCY NUMBER 26 OF 2011 CONCERNING THE CONTROL OF LIVESTOCK

By:
Inderi Lara Safitri
2163201059

This research is motivated by the persistent issue of livestock being allowed to roam freely in Mukomuko Regency. This phenomenon has caused various negative impacts, such as disturbing public order, endangering community safety, and damaging environmental sustainability. To address this problem, the Mukomuko Regency Government enacted Regional Regulation Number 26 of 2011 concerning the Control of Livestock. The regulation aims to manage the ownership, maintenance, and movement of livestock to prevent social disturbances. However, more than a decade after its enactment, its implementation is still considered suboptimal and has not significantly reduced the number of violations. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 26 of 2011 in Mukomuko Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its execution.

The research employs a qualitative descriptive approach, with the study conducted in Mukomuko Regency. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants include officers from the Civil Service Police Unit (Satpol PP), village officials, livestock owners, and non-livestock-owning community members. Informants were selected using a snowball sampling technique. Data analysis applies Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which includes six main variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementers' characteristics, social-economic-political conditions, and implementers' disposition. The results indicate that the implementation of the regulation has not been optimal. The main obstacles include the community's low understanding of the policy content, limited resources for implementation, minimal socialization efforts, and weak coordination among agencies. Moreover, the implementers show a low level of disposition and tend to act reactively. Enforcement activities are not scheduled and seldom involve village officials actively. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of implementers, provide supporting facilities, and enhance collaboration with the community to ensure the policy is implemented more effectively and sustainably.

Keywords: Policy implementation, Regional Regulation, livestock control, Satpol PP, Van Meter and Van Horn.

RINGKASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak; Inderi Lara Safitri, 2163201059; 2025; 106 halaman; Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menata kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam urusan penertiban hewan ternak. Di Kabupaten Mukomuko, masalah hewan ternak yang berkeliaran bebas telah lama menjadi permasalahan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan lalu lintas, dan merusak lingkungan. Berdasarkan realitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 6, yang melarang pemilik ternak untuk melepasliarkan hewan di ruang publik seperti jalan raya, taman, lokasi reboisasi, dan tempat lainnya. Namun, meskipun regulasi ini telah diterapkan lebih dari satu dekade, pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih banyak hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. Hal ini memicu konflik antar warga, potensi kecelakaan, hingga gangguan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Perda tersebut telah dijalankan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilannya.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel utama: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana. Pendekatan ini dinilai paling relevan untuk memahami kompleksitas pelaksanaan kebijakan daerah secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi studi di Kabupaten Mukomuko. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik snowball sampling untuk menentukan informan penelitian. Informan yang terlibat berasal dari berbagai unsur seperti aparat Satpol PP, aparat desa, peternak, dan warga masyarakat non-peternak. Fokus penelitian diarahkan pada enam indikator dari teori Van Meter dan Van Horn. Validitas data

diuji dengan metode triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terjadi pada seluruh variabel tersebut. Tujuan kebijakan belum memiliki indikator kinerja yang terukur, sumber daya manusia dan fasilitas pelaksana terbatas, serta sosialisasi kepada masyarakat kurang intensif. Komunikasi antarinstansi belum efektif dan struktur birokrasi cenderung kaku, sedangkan budaya masyarakat yang membiarkan ternaknya lepas berkeliaran masih menjadi tantangan utama. Selain itu, disposisi pelaksana dalam memahami dan menegakkan kebijakan juga rendah. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana pendukung, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan penegakan peraturan. Dengan upaya tersebut, implementasi Perda diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak” dengan baik dan lancar, sholawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dalam menjalankan dan menyikapi kehidupan di dunia ini.

Penulis melakukan penyusunan proposal penelitian sebagai syarat menyelesaikan jenjang perkuliahan Strata Satu (S-1) yang telah ditentukan oleh Fakultas Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang berperan dalam penulisan proposal penelitian ini sehingga penulisan proposal penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar, kepada:

1. Ibu Dr. Titi Darmi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak kontribusi dan telah meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Novliza Eka Patriska, M.Si selaku ketua program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Ibu Dr. Juliana Kurniawati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang skripsi maupun saat revisi skripsi ini
5. Keluarga dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati segala bentuk kritik dan saran yang membangun sehingga memberikan hasil yang terbaik bagi isi dan penulisan dari proposal penelitian ini.

Bengkulu, Juni 2025

Inderi Lara Safitri
Npm. 2163201059

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Konsep Kebijakan Publik	12
2.3 Implementasi Kebijakan.....	13
2.4 Teori Impementasi Kebijakan.....	15
2.5 Peraturan Dearah Penertiban Hewan Ternak.....	21
2.6 Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	26
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Keabsahan Data	32
3.8 Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Deskripsi Lokal Penelitian	37
4.1.1 Geografi	37
4.1.2 Pemerintahan	38
4.1.3 Penduduk	41
4.2 Karakteristik Informan	44
4.3 Hasil Penelitian.....	47
4.3.1 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011	47
4.3.2 Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn ...	49
4.4 Pembahasan	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian	28
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Mukomuko tahun 2023.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri sipil di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2023	39
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kab. Mukomuko Tahun 2023	42
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Kab. Mukomuko Tahun 2023...	43
Tabel 4.5 Jumlah Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Mukomuko	43
Tabel 4.6 Karakteristik Informan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Berfikir	25
Gambar 4. 1 Lokasi Kabupaten Mukomuko	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah, memiliki struktur pemerintahan yang mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Struktur ini memungkinkan dalam penyusunan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Eksistensi daerah di Indonesia sudah ada sejak awal kemerdekaan, dengan dibentuknya Komite Nasional Daerah (KND) yang menjadi cikal bakal pemerintahan daerah (Patarai, 2021). Seiring perjalanan waktu, otonomi daerah menjadi salah satu agenda reformasi yang membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Melalui otonomi, kebijakan publik di tingkat daerah dapat disusun melalui Peraturan Daerah, yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur kebutuhan spesifik suatu wilayah (Astari dkk., 2023).

Peraturan Daerah menjadi alat strategis bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih relevan dengan karakteristik pada suatu wilayah. Peraturan daerah berfungsi sebagai pedoman, kerangka, dan arah pencapaian tujuan pembangunan di suatu wilayah. Jika dirancang dengan baik dan terintegrasi, peraturan daerah mampu memberikan kontribusi positif serta mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik di tengah masyarakat. Peraturan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak (Umar dkk., 2023). Berdasarkan kewenangan kebijakan penyusunan Peraturan Daerah tentang hewan

ternak harus didasarkan pada alasan yang sesuai sehingga peraturan ini dapat diimplementasikan.

Implementasi kebijakan terkait hewan ternak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya hewan. Pasal 3 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa tujuan utama pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia adalah memastikan pengelolaan sumber daya hewan dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, jasa dan barang dari hewan secara mandiri dan kompetitif untuk mendukung kesejahteraan peternak serta masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Setiap orang diwajibkan melindungi wilayah Indonesia dari ancaman yang dapat membahayakan kesehatan manusia, tumbuhan hewan maupun lingkungan. Dengan kata lain, manusia dan hewan ternak harus dilindungi dari ancaman seperti penyakit atau pencemaran lingkungan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Aturan ini juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha di sektor peternakan dan kesehatan hewan agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap manusia dan hewan ternak dari berbagai potensi ancaman sangat penting untuk menjaga kesehatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Permasalahan yang sering muncul menurut berita dari daerah Kabupaten Mukomuko yaitu banyaknya hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya, area publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil observasi

penelitian Insari dan Safrida. (2022) menyatakan bahwa hewan-hewan ternak sering kali dibiarkan berkeliaran bebas tanpa penertiban dari pemiliknya, sehingga dapat menimbulkan suatu ancaman kesehatan bagi hewan lain, manusia, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Hewan ternak yang tidak ditempatkan di kandang atau tidak disediakan kandang oleh pemiliknya dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar (Latief dan Ka'bah., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penertiban untuk memastikan setiap hewan ternak berada dalam kondisi yang aman dan terkontrol.

Keberadaan ternak yang tidak terkontrol tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, akan tetapi juga menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti hewan ternak yang berkeliaran bebas dapat merusak tanaman milik warga, mengganggu lalu lintas, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan hasil penelitian Wijaya dkk. (2023) permasalahan pada sektor peternakan di Indonesia karena kurangnya kesadaran pemilik ternak untuk menjaga hewan peliharaannya agar tidak mengganggu masyarakat sekitar, seperti tidak mengikat serta tidak mengawasi hewan peliharaannya ketika akan mencari makan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tegas dari pihak pemerintah guna mengatasi berbagai persoalan di sektor peternakan secara efektif. Hal ini penting karena pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi ekonomi besar, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Terdapat berbagai jenis hewan ternak yang biasa di pelihara masyarakat

pada umumnya seperti sapi, kerbau dan kambing. Berdasarkan data BPS tahun 2017, populasi ternak di Kabupaten Mukomuko terus meningkat, dengan jumlah sapi mencapai 24.290 ekor, kerbau 3.801 ekor, dan kambing 16.539 ekor. Namun, peningkatan jumlah ternak ini menimbulkan tantangan baru, terutama jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pemilik ternak. Hewan ternak yang dilepas bebas sering kali menimbulkan gangguan, seperti merusak tanaman warga, mengganggu lalu lintas, hingga menyebabkan konflik sosial.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak. Adapun isi kebijakan pada pasal 6 dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, pemilik ternak dilarang:

- a. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan.
- b. Melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 menjadi elemen utama dalam kebijakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat peternak dengan kepentingan umum, khususnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kebijakan ini dirancang untuk meminimalkan konflik antara masyarakat peternak dan warga lainnya akibat dampak negatif yang ditimbulkan

oleh hewan ternak yang tidak terkontrol. Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 pasal 6 pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab sebagai pemilik ternak. Selain itu, larangan pada Pasal 6 ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar warga akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak, baik berupa kerusakan fasilitas umum maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan terhadap lokasi di mana ternak boleh digembalakan menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas peternakan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak dan kenyamanan masyarakat lain.

Implementasi kebijakan ini sudah cukup lama diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Beberapa masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami isi peraturan, atau bahkan menilai kebijakan ini sebagai sesuatu yang kurang relevan dengan budaya lokal. Selain itu, keterbatasan sumber daya pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi kendala tersendiri (Hastuti dan Anwar., 2021). Kebutuhan akan infrastruktur pendukung seperti tempat penampungan sementara untuk ternak yang ditangkap, yang saat ini masih minim di Kabupaten Mukomuko. Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya konflik antara kepentingan masyarakat peternak dan tujuan kebijakan publik. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari beternak merasa bahwa membiarkan ternaknya berkeliaran adalah bagian dari cara mereka menjaga dan memelihara

ternak. Pada saat yang sama, masyarakat umum merasa dirugikan oleh kebiasaan ini karena berdampak pada lingkungan dan ketertiban umum.

Pendekatan yang komprehensif melibatkan tidak hanya penegakan hukum yang tegas tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (Wahono dkk., 2021). Pemerintah perlu menggandeng tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak-pihak yang berpengaruh di daerah setempat untuk menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya peraturan ini. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mematuhi peraturan karena takut akan sanksi, tetapi juga memahami bahwa peraturan ini dibuat untuk kebaikan bersama.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Pasal 6 bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya dalam menciptakan ketertiban umum dan mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi peraturan, serta mencari tahu solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang ada. Secara keseluruhan, kebijakan penertiban hewan ternak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah itu sendiri. Diharapkan melalui implementasi peraturan daerah yang mendalam terhadap kebijakan ini, dapat ditemukan solusi-solusi inovatif yang tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas implementasi peraturan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara

keseluruhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tentang Penertiban Hewan Ternak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh penulis.
 - b. untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak.
- b. Bagi masyarakat khususnya para pemilik hewan ternak, dapat memahami dengan lebih baik peraturan yang berlaku serta dampak positif dari mematuhi aturan tersebut terhadap lingkungan, kesehatan, dan ketertiban umum.